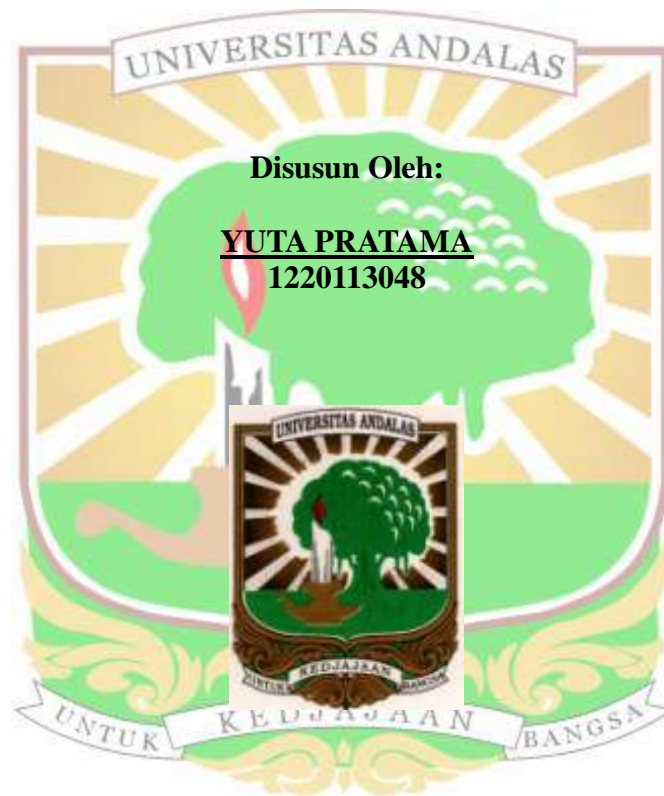


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI MENURUT  
SURAT KEPUTUSAN PANGLIMA TNI NOMOR : SKEP/311/VIII/2005  
(Studi kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/MIL/2015)**

**TESIS**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*



**Disusun Oleh:**

**YUTA PRATAMA**  
**1220113048**

Pembimbing I : Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2017**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI MENURUT SURAT KEPUTUSAN PANGLIMA  
TNI NOMOR : SKEP/311/VIII/2005  
(Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/MIL/2015)**

**ABSTRAK**

**(YUTA PRATAMA, 1220113048, Program Studi Magister Hukum, Universitas Andalas,  
122 hlm)**

Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang), akhir-akhir ini kembali menjadi perbincangan setelah korban demi korban berjatuh. Hal yang sangat memprihatinkan adalah penyalahgunaan berupa pemakaian secara ilegal yang dilakukan oleh oknum TNI yang merupakan komponen utama dalam pertahanan negara. Adanya perbedaan antara Skep Panglima TNI dengan Putusan Mahkamah Agung No.88/K/MIL/2015 membuat penulis tertarik membahas

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI menurut surat keputusan panglima TNI Nomor :SKEP/311/VIII/2005 (studi kasus: Putusan Mahkamah Agung No.mor 88 K/MIL/2015)
- 2) Apakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI menurut surat keputusan panglima TNI Nomor :SKEP/311/VIII/2005 (studi kasus: Putusan Mahkamah Agung No.mor 88 K/MIL/2015)
- 3) Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI menurut surat keputusan panglima TNI Nomor :SKEP/311/VIII/2005 (studi kasus: Putusan Mahkamah Agung No.mor 88 K/MIL/2015).

Metode penelitian adalah dengan metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian

- 1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan Surat keputusan Panglima TNI Nomor : SKEP/311/VIII/2005, yaitu dengan pemberhentian tidak hormat.
- 2) Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Surat keputusan Panglima TNI Nomor : SKEP/311/VIII/2005 adalah Saksi-Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer adalah bersifat Saksi Verbal atau dengan kata lain hanya saksi yang melihat proses pelaksanaan pemeriksaan tes urine, tidak dilengkapi dengan foto copy formulir pemeriksaan dan Tes Kit Narkotika, Tes urine yang dilakukan oleh BNNP Riau juga sangat meragukan,
- 3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Surat keputusan Panglima TNI Nomor : SKEP/311/VIII/2005 adalah dengan pemberhentian tidak hormat karena Pidana tambahan pemecatan akan berdampak positif terhadap Kesatuan Prajurit yang bersangkutan apabila putusan tersebut sesuai harapan komandan Kesatuannya misalnya Prajurit tersebut memang betul-betul tidak bisa dibina lagi sehingga pantas dijatuhi hukuman pemecatan .

**LAW ENFORCEMENT OF NARCOTIC'S CRIME DONE BY TNI 'S MEMBER BASE  
ON TNI COMMANDER DECREE NO : SKEP/311/VIII/2005  
(Case Study : Supreme Court Decision No: 88K/MIL/2015)**

**ABSTARCT**

**(YUTA PRATAMA, 1220113048, Master Of Law,  
Andalas University, 122 PP)**

the drug abuse (narcotics and drugs ) recently become a main topic in social environment since, many of the victims are getting fall continuously. The most worrying thing in this chase is the illegal use of such abuse committed by military personnel as a major component of national defense. The discrepancies between TNI commander SKEP and supreme court decision no 88/MIL/2015 makes the writer is interested to discus 1) how is the low enforcement of narcotic's crime done by TNI 's member base on TNI commander decree No : SKEP/311/VIII/2005 (case study : supreme court decision no: 88K/MIL/2015). 2) What are the barriers in low enforcement against the narcotic's crime done by TNI 's member base on TNI commander decree No : SKEP/311/VIII/2005 (case study : supreme court decision no: 88K/MIL/2015). 3) what efforts are made to overcome the barrier of enforcement against narcotic's crime done by TNI 's member base on TNI commander decree No : SKEP/311/VIII/2005 (case study : supreme court decision no: 88K/MIL/2015). The research method which is used by the writer in this study is sociological yuridis method. The result of the study are: 1) law enforcement against narcotic crime base on TNI Commander Decree No: SKEP/311/VIII/2005, namely with dishonorable discharge. 2) the barriers in low enforcement against the doer of narcotic crime base on TNI Commander virtue decision No: SKEP/311/VIII/2005, with the witnesses filled by military prosecuting attorney are become verbal witnesses or in the other words they only can see the process of urine implementation test and do not equip with a copied of inspection form and narcotic kit test. The urine test which is conducted by BNNP RIAU is very dubious. 3) The effort made in overcoming obstacle low enforcement against the doer base on virtue of TNI Commander Decision No: SKEP/311/VIII/ 2005. If the decision was as expected the commander, the dishonorable discharge because of extra criminal dismissal will positively affect to unity of the soldier concern. For an example, a soldier who really could not be developed is appropriate to get the sentenced to dismissal.